

***JURIDICAL REVIEW OF THE AUCTION OF NON-CULTURAL HERITAGE
SUNKEN SHIP CARGO (BMKT) WITHIN THE PERSPECTIVE OF
INDONESIAN NATIONAL LAW***

Nabila Annisa Rafiq* dan Marsudi Triatmodjo**

ABSTRACT

This research examines the urgency transparency and legal certainty in the management of sunken ship cargo (BMKT) in Indonesia, particularly following the enactment of Presidential Regulation 8/2023. The primary issue in this research is the regulatory disharmony and overlapping authority between institutions, which has implications for the failure of economic utilization and threats to the preservation of underwater cultural heritage.

This research method used is empirical juridical by conducting field studies at the BMKT Museum of Ministry of Marine Affairs and Fisheries and interviews with related informants. The research results show that BMKT management is currently still trapped in a commercialization paradigm through an auction mechanism that failed due to a disconnection between domestic regulations and international market targets, This research concludes and recommends the need for cross-sectoral regulatory integrations, acceleration of international standards, and repositioning of BMKT utilization from a trade-oriented approach to an education and research orientation through the redistribution of artifacts to museums in Indonesia.

Keywords:

BMKT, Legal Certainty, Transparency, Auction.

- * Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: nabilaannisarafiq@mail.ugm.ac.id
- ** Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Email: triatmodjo.marsudi@ugm.ac.id

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELELANGAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) NON-CAGAR BUDAYA DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA

Nabila Annisa Rafiq* dan Marsudi Triatmodjo**

INTISARI

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi transparansi dan kepastian hukum dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Perpes8/2023. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakharmonisan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang berimplikasi pada kegagalan pemanfaatan ekonomi serta ancaman terhadap kelestarian warisan budaya bawah air.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan studi lapangan di Museum BMKT Kementerian Kelautan dan Perikanan serta wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMKT saat ini masih terjebak dalam paradigma komersialisasi melalui mekanisme lelang yang gagal akibat dikoneksi antar regulasi domestik dengan target pasar internasional.

Penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan perlunya integrasi regulasi lintas sektor, akselerasi standar internasional serta reposisi pemanfaatan BMKT dari orientasi jual-beli menjadi orientasi edukasi dan penelitian ini melalui redistribusi artefak ke museum-museum di Indonesia.

Kata Kunci:

BMKT, Kepastian Hukum, Transparansi, Lelang.

- * Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: nabilaannisarafiq@mail.ugm.ac.id
- ** Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: triatmodjo.marsudi@ugm.ac.id